

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Disertasi. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Asshiddiqi, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- , 2006. *Pengantar Hukum Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MKRI
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B., 2007, Expanded - *The New Public Service: serving, not steering*, M.E. Sharpe, Inc, New York, USA
- Djojosedjito, A. 2001. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Menyongsong AFTA 2003*. Pusat Data dan Informasi, Jakarta.
- Dwiyanto. 2006. *Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gender, Pegarusutamaan. 2009. *Kans Otonomi Daerah Dalam Percepatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gibson, J.L. (2003). *Struktur Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Haryono, Siswoyo. 2018. *Manajemen Kinerja SDM Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Luxima Metro Media
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta. Gava Media
- Hidayat, A.A. A. 2008. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Medika.

- Islami. 2002: *Kualitas Pelayanan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik Daerah, Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: CLOGAPPS Universitas Diponegoro.
- Ilyas Yasli. 2001. *Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian*, Jakarta: Pusat Kajian Kepuasan Masyarakat.
- _____. 2005. *Kinerja Teori dan Penelitian*. Liberty. Yogyakarta edisis II
- Jimung, Martin.2004. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. *Undang-Undang Dasar 1945. RI, LAN, SANKRI Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta*.
- Keban, 1995. *Karakteristik Manajemen Pelayanan Pada Sektor Publik Sebagai Suatu Keseluruhan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Daerah Yogyakarta* Yogyakarta. Pascasarjana Universitas Gaja Mada-UGM 2013.
- Keban, Yeremias T., 1995, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Makalah seminar sehari Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*. Jakarta, Gava Media.
- Kohler, E.L. 1975. *A Dictionary For Accountants*. 5Th Ed. Englewood Cliffts, N.J. USA: Prentice Hall.
- Lapalombara, Joseph dan Weiner, Myron. 1978. *Political Parties and Political. Development*. Princeton: Princeton University Press
- Luthas. 2004. *Organisasi dan Manajemen Kinerja Perusahaan*. Cetakan Kedua. Bandung:Ina Cana
- Ma'arif, Syamsul dan Kartika, Lindawati, 2012, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, Implementasi Menuju Organisasi Berkelanjutan, IPB Press, Bogor, Indonesia.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sekjen Kemenhukum dan HAM
- Mahsun. 2006. *Azas Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. "Pelayanan Prima". Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

- Mahmudi. 2005. *Perilaku Organisasi* Edisi Pertama. Jakarta. Salemba Empat.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Keenam. Remaja Rosda Karya Bandung.
- . 2007. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama
- . 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. AMP YKPN, Yogyakarta
- . 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. UPP STIEM YKPN. Yogyakarta
- McShane, S.L. & Von Glinow, M. A. (2010). *Organizational behavior*. (5th ed.). New York: McGraw Hill.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marini, Frank, (2000), *Toward a New Public Administration*. Chandler Publishing Company, Scranton, London, Toronto
- Miles. M.B dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Miles. M.B dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UIP.
- Michael Armstrong, *Personnel Management Practice* (London:Kogan Page, 1995, p.173
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Moeheriono, 2012, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mote, Frederik, 2008, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngesrep Semarang*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulyadi, Deddy. 2008. *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung : ALFABETA*.

- Ndraha, 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2001. *Peran Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Menghadapi Masa Krisis*. Jakarta:Suara Pembaruan Daily.
- Pasolong, Harbani. 2007 *Pembangunan Sumber Daya Manusia: Perspektif Administrasi Publik*, Jurnal Administrasi Negara STIA-LAN.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Penerapan The New Public Service (NPS) dan New Public Management (NPM)*. Makassar.
- Perry, Potter. 2009. *Fundamental Keperawatan, Buku 1, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Medika.
- Prawirosentono. 1999. *Pelayanan yang Berkualitas*. Cetakan keempat. Jakarta Selatan.
- Qamar, Nurul. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makasar: Arus Timur.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta :ANDI
- Robbins, Stephen dan Timorthy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi, Organizational Behavior*". Buku Terjemahan. Jakarta. Gramedia
- Sailan, Manan. 2009. *Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Syafiie, Inu Kencana . 2007. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga
- Satrianegara, M. Fais., 2009. *Buku Ajar Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Saptoharyoko. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2017. *Reformasi Administrasi Public, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemimpinan Yang Baik)*. Cetakan Keempat. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Refika Aditama
- Siagian, Sondang. 1992. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

- Siagian, Sondang. 1992. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta:Gunung Agung
- Simamora, Henry 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIEYKPN, Edisi Kedua, Yogyakarta.
- _____, 2004. *Riset Sumber Daya Manusia*, Edisi Ke-2, Cetakan Ketiga,STIE YKPN, Yogyakarta
- Sinambela, Poltak Lijan, 2012, *Kinerja Pegawai, Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak Payman. 1987. *Produktivitas Kerja*. Konteks Prinsip.
- Situmorang, Victor M, & Jusuf Juhir.1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sutrisno Hadi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Stinger. 2007. *Iklim Organisasi*. Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung :Cipta Anugerah
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Walters, M. 1995. Developing organisational measures, in M Walters (ed), *The Performance Management Handbook*, Institute of Personnel and Development, London
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Bayu Media

Wiku. 2007. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 *Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.*

Depkes RI. (2009) Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta

Kementerian Kesehatan RI (2019). *Profil Kesehatan Indonesia 2018* . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 *Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004
*Pelayanan Merupakan Segala Kegiatan Yang Dilaksanakan Instansi
Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda) Dan
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Baik Pemenuhan
Kebutuhan Sesuai Undang-undang.*

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995
Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*.
Jakarta: LAN.

Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014 Permendagri Nomor 27 Tahun
2013

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sinjai

Jurnal

Alishban, 2009. *Persepsi dalam Pengorganisasian and A Multiple item Scale
for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. Journal of
Retailing. Hal:167

Dede Yuda Wahyu Nurhuda. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD
Terhadap Pelaksanaan APBD Dalam Bidang Kesehatan* (Penelitian
di DPRD Kab Tasikmalaya pada tahun Anggaran 2014). Jurnal
Kesehatan Bakti Tunas Husada Volume 14 Nomor 1 Agustus 2015

Liky Faizal, "*Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah,*" Jurnal
TAPIS, Vol. 7 No.13, Juli-Desember 2013, hlm. 6.

Levinson, H (1970), *Management By Whose Objectives?*, Harvard Business
Review, July-August, pp 125-34

Mosseng, B. and Bredrup, H. 1993, *A methodology for industrial studies of
productivity performance*, *Journal of Production Planning and Control*,
Vol. 4 No. 3, pp. 198-206.

Muhlis Hajar Adiputra, Haselman, Hamsinah. *Implementasi Kebijakan
Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Sinjai*. Administrasi
Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Hasanuddin.

Sulistio, Eko Budi. 2010. *Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan)*. *Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol 1, No 1.

Tangen, Stevan (2004). *Performance Measurement: From Philosophy To Practice, International Journal of Productivity and Performance Management, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 53 No. 8, 2004 pp. 726-737.*

Agustinus Widanarto, *Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja. Pemerintah.* (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012.

WEBSITE :

Jayani, Dwi Hadya .(2 April 2020. "Rasio Dokter Indonesia Terendah Kedua di Asia Tenggara". Databoks Katadata. Diakses tanggal 16 Juni 2021.

Franken, Josh (2 Mei 2011). "Analysis: Indonesia: The health of the nation". The Jakarta Post. Diakses tanggal 17 September 2020.

Britnell, Mark (2015). *In Search of the Perfect Health System.* London: Palgrave. hlm. 47. ISBN 978-1-137-49661-4.

Sukisno, *Visi, Misi, Rencana Strategis & Taktis dalam Perguruan Tinggi, Curriculum Development Practice 1, Engineering Education Development Project* dalam <http://www.eng.unri.ac.id> (30 Mei 2021).

Lampiran 1

MATRIKS HASIL WAWANCARA

Variabel	Indikator	Sumber dan Waktu	Pertanyaan	Jawaban Informan
Kinerja Pengawasan	Misi	Ketua Komisi I DPRD Waktu 07 April 2021	Bagaimana misi DPRD Kabupaten Sinjai terhadap pengawasan pelaksanaan kesehatan dasar di kabupaten Sinjai?	Salah satu tugas DPRD itu adalah pengawasan. Pengawasan jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), karena kami dipilih oleh rakyat, maka kami selaku anggota DPRD harus mengawasi apakah pemerintah sudah memperhatikan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan dasar yang menjadi ciri bagi daerah membangun yang masih rendah dan rentang terhadap penyakit umum (dasar) yang paling banyak diderita oleh masyarakat.”
		Ketua Komisi I DPRD Waktu : 7 April 2021	Bagaimana hakekat pengawasan DPRD terhadap Pemkab Sinjai?	Walau pengawasan DPRD itu secara politis, tetapi sebagai mitra pemerintah, kami (DPRD) perlu menyampaikan nota-nota kesepakatan dan nota-nota protes yang sifatnya tidak sejalan dengan aturan (kebijakan) yang pro rakyat. Maka dari itu pemerintah wajib mendengar dan menindaklanjuti temuan dan aduan masyarakat kepada kami.
		Anggota Komisi I DPRD Waktu : 9 April 2021	Apa saja ruang lingkup kesehatan yang menjadi misi yang menjadi sasaran pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sinjai?	Hal mendasar yang kami harus diawasi adalah kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut, dalam artian upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Sinjai memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, yakni; pencegahan, penyediaan fasilitas, dan pemberantasan penyakit sampai keseluruhan lapisan masyarakat.

Rencana dan Tujuan Pengembangan	Anggota Komisi I DPRD Waktu : 03 Mei 2021)	Bagaimana rencana dan tujuan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sinjai terhadap pelaksanaan pengawasan kesehatan dasar di Kabupaten Sinjai?	Fungsi pengawasan DPRD itu berbentuk pengawasan politis bersifat strategis, bukan administrasi semata. Artinya pengawasan DPRD tidak melihat detailnya, tetapi melihat konsistensi pada kebijakannya. Adapun rencana dan tujuan pengawasan kami terhadap kesehatan dasar adalah melihat dari arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Dinkes) apakah pro rakyat atau tidak. Selanjutnya kita buat agendanya.
	Anggota Komisi I DPRD Waktu : 03 Mei 2021	Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pengawasan kesehatan dasar di Kabupaten Sinjai?	Mekanisme pengawasan DPRD melalui Perda, kemudian pelaksanaannya, begitu juga pada APBD dan pelaksanaannya. Ketika ada indikasi atau laporan penyimpangan, maka kami wajib memanggil SKPD terkait. Bila SKPD-nya Dinas kesehatan, maka Kepala Dinas dan jajarannya kita panggil untuk menjelaskannya.
	Kepala Dinas kesehatan sinjai Waktu : 27 April 2021	Apa program kerja Dinkes 2020 ?	Program kerja tersebut sebagai rencana kerja kami tahun 2019-2020 sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sinjai
	Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Waktu : 27 April 2020	Apa tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2020?	Tujuannya adalah mengoperasionalkan tugas dan fungsi Dinkes, mengevaluasi program sebelumnya yang tidak teralisasi maksimal, merumuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya, menetapkan indikator apa yang hendak dicapai." (Wawancara, 27 April 2021)
	Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Waktu : 27 April 220	Apa landasan pokok dan capaian penyusunan renja Dinkes 2020?	Turunan utama dalam penyusunan Renja Dinkes adalah UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RPJMN 2015- 2019 disusun untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden dan

				menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025
Kesepakatan Kinerja dan Pengembangan	Ketua Komisi I DPRD Sinjai Waktu : 29 April 2020	Bagaiman proses penyusun RAPBD menjadi APBD Dinkes Sinjai?	Menyusun RAPBD menjadi APBD sesuatu yang tidak mudah dan melibatkan dua lembaga daerah (Pekab dan DPRD), dimana Pekab menyusun RAPBD dalam bentuk draf rancangan yang diserahkan ke DPRD bagian anggaran melalui Sekretariat DPRD. Adapun tahapannya sesuai undang-undang sebanyak 6 tahapan. Selanjutnya kita pelajari dengan mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran.	
	Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Waktu : 29 April 2021	Bagaiman mekanisme penyusunan rencana kerja (Dinkes) yang disusun dalam draf APBD tahun 2020?	RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan prioritas bidang kesehatan sesuai visi misi Pemerintah Kabupaten Sinjai. RKA SKPD Bidang kesehatan disusun berdasarkan pendekatan maju dan terpadu. Selanjutnya kita (Dinas Kesehatan) lakukan analisis kewajaran beban kerja dan beban biaya.	
	Kepala Dinas kesehatan Sinjai Waktu : 29 April 2021	Apa prioritas dalam penyusunan RKA Dinkes 2020?	Pertama-tama adalah plafon anggaran, kemudian analisis program kerja sesuai visi dan misi Pekab yang masih kurang terealisasi tahun lalu (2019), dan bila itu dianggap penting, maka akan kami lanjutkan sebagai program tahun 2020 dan diajukan pada RKA-SKPD.	
	Kepala Dinas kesehatan Sinjai Waktu : 29 April 2021	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKA Dinkes Sinjai?	Bahwa Proses perencanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tidak lepas dari usulan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) yang kemudian	

				disesuaikan dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
		<p>Sekretaris Dewan DPRD Sinjai</p> <p>Waktu : 27 Mei 2021</p>	<p>Bagaimana mekanisme pembahasan RAPBD Sinjai?</p>	<p>Mekanisme pelaksanaan pembahasan RAPBD merujuk pada 3 undang-undang (tersebut di atas). Dimana setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD melakukan pembahasan mengenai RKA-SKPD, maka diserahkanlah dari Pemkab dan diterima oleh Sekretariat DPRD Kab.Sinjai untuk dilakukan oleh pembahasan oleh komisi anggaran DPRD. Pada posisi inilah biasanya cukup pelik dan banyak tarik ulur kepentingan, termasuk negoisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD.</p>
		<p>Sekretaris Dewan DPRD Sinjai</p> <p>Waktu : 27 Mei 2021</p>	<p>Bagaimana konsistensi DPRD Kabupaten Sinjai terhadap pembangunan bidang kesehatan dasar masyarakat ?</p>	<p>Selama keanggotaan DPRD periode 2019 -2024 ini, saya perhatikan cukup aspiratif dan konsisten membela rakyat melalui penyiapan anggaran. Hal ini terbukti tidak ada anggaran yang dipangkas atau dibuang, apalagi selama Covid-19, bahkan ada beberapa poin yang diangkat (diambil dari anggaran lain)</p>
		<p>Anggota Komisi I DPRD Sinjai</p> <p>Waktu : 27 Mei 2021</p>	<p>Bagaimana konsistensi DPRD Kabupaten Sinjai terhadap pembangunan bidang kesehatan dasar masyarakat ?</p>	<p>Betul itu, salah satu SKPD yang tidak melakukan banyak perubahan (ditambah/dialihkan) adalah Dinas Kesehatan, sebab kondisi tahun lalu dan saat ini Bidang Kesehatan sedang dalam siatuasi yang genting, apalagi sejak upaya pemberantasan stunting dan Covid-19, bahkan ada yang kami ajukan cepat yaitu pembangunan ruang isolasi di RSUD Sinjai, karena masalah pandemi Covid-19</p>
		<p>Ketua Komisi I DPRD Sinjai</p> <p>Waktu : 29 Mei 2021</p>	<p>Bagaimana kesepakatan antara DPRD dengan Dinkes?</p>	<p>Sesuai dengan UU Pemda disebutkan bahwa antara eksekutif dan legislatif harus bekerjasama dalam pembangunan daerah dengan memanfaatkan SD yang tersedia yang dituangkan</p>

				dalam APBD. Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan kinerja itu adalah pengesahan RAPBD menjadi APBD.
		Kepala Dinas Sinjai Waktu : 30 Mei 2021	Program dan bagaimana capaian yang disahkan oleh DPRD Sinjai?	Tahun 2020 ada 7 program wajib kita ajukan dalam RAPBD, dan semua itu diterima oleh DPRD. Masing-masing program kegiatan itu ada tolok ukur (standar capaian) dan target (jumlah) yang harus dicapai, sehingga itulah yang kami kerjakan selama 2020 dan pertanggungjawabkan kembali ke DPRD sebagai wakil rakyat dalam bentuk LKj (laporan kinerja).
Rencana Kerja dan Pengembangan		Kadis Kesehatan Sinjai Waktu : 30 Mei 2021	Bagaiman program dan pengembangan kesehatan dasar di Kabupaten Sinjai?	Kami membuat program kerja pada Dinas Kesehatan adalah mensinergikan antara visi misi Pemerintah Kabupaten Sinjai, kebijakan Kementerian Kesehatan (secara nasional) dan kondisi daerah. Itulah yang kami turunkan dalam bentuk strategi pembangunan bidang kesehatan, dan diuraikan dalam bentuk program jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (2-3) tahun.
		Kadis Kesehatan Sinjai Waktu : 30 Mei 2021	Apa saja jenis program kerja Dinkes Kabupaten Sinjai?	Kami (Dinkes) membuat program utama dan program penunjang. Program utama adalah terkait dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pemberantasan penyakit, sedangkan program terkait kegiatan penunjang program utama (administrasi dan pelaporan).
		Anggota Komisi I DPRD Waktu : 30 Mei 2021	Bagaimana persepsi dan tanggapan wakil rakyat terkait program kerja Dinkes tahun 2020?	Saya kira yang lebih paham itu adalah Dinkes sendiri, dan mereka telah membuatnya. Dan setelah kami periksa secara seksama sudah baik dan telah merepresentasikan upaya kesehatan rakyat. Intinya sebenarnya adalah pelaksanaannya, apakah mereka dapat merealisasikannya.

Tindakan Kerja dan Pengembangan	Sekretaris DPRD Sinjai Waktu : 03 Juni 2021	Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sinjai terhadap pelaksanaan APBD?	Fungsi DPRD saat ini diatur dalam PP No. 12 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD yang mengatur tugas dan fungsi DPRD yang terdiri dari pembembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.
	Staf Sekretariat DPRD Sinjai Waktu : 03 Juni 2021	Bagaimana dan apa yang dibahas pada rapat Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai ?	Rapat komisi adalah rapat yang dilakukan dalam internal komisi, rapat ini diagendakan dengan mengundang seluruh anggota komisi termasuk ketua komisi. Hal-hal yang dibahas dalam rapat komisi adalah terkait bidang kerja dalam komisi tersebut.
	Staf Sekretariat DPRD Sinjai Waktu : 03 Juni 2021	Bagaimana partisipasi anggota dan Ketua Komisi I pada rapat-rapat komisi?	Komisi I DPRD Sinjai membidangi pendidikan dan pemerintahan, maka pokok bahasannya seputar bidang tersebut. Pada umumnya rapat komisi itu akan membahas masalah program dan pertanggungjawaban kinerja SKPD yang disampaikan oleh Bupati.
	Anggota Komisi I DPRD Sinjai Waktu : 03 Juni 2021	Kapan dilakukan rapat komisi terkait kesehatan dasar?	Rapat komisi yang kami lakukan pada bidang kesehatan dasar adalah ketikan pengajuan RKA SKPD bidang kesehatan, disitulah kami periksa program-program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, kemudian pada rapat komisi membahas pertanggungjawaban pelaksanaan program berdasarkan usulan yang disetujui sebelumnya dengan penggunaan anggaran.
	Staf Sekretariat DPRD Sinjai Waktu : 03 Juni 2021	Mengapa dan bagaimana dilakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai?	Kegiatan kunjungan kerja oleh Komisi dilakukan ketika hendak mendapatkan informasi atau perbandingan untuk dijadikan rujukan terhadap suatu pengambilan keputusan. Komisi I Pernah lakukan ke Rumah Sakit Daerah Sinjai, ketika ada informasi mengenai masalah keterbatasan ruang isolasi Covid-19 tahun 2020.

	<p>Anggota Komisi I DPRD</p> <p>Waktu: 04 Juni 2021</p>	<p>Mengapa dan bagaimana dilakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai?</p>	<p>Kunjungan kerja kami lakukan untuk mencari informasi pasti atau kebenaran jika ada laporan atau informasi masalah kesehatan atau lainnya yang terkait kesehatan dasar. Tujuannya untuk membuat data sebelum membuat keputusan bersama. Seperti itu masalah ruang isolasi yang belum tersedia, maka kami harus periksa lalu bahas dengan teman-teman di komisi agar pembuatan keputusan tidak salah.”</p>
	<p>Staf Sekretariat DPRD Sinjai</p> <p>Waktu : 03 Juni 2021</p>	<p>kiprah Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengawasan melalui rapat gelar pendapat ?</p>	<p>Sejak tahun 2019 sampai 2021 ini, Komisi I cukup sering melakukan rapat dengar pendapat terkait bidang kesehatan, ada usulan Komisi I sendiri ada juga permintaan lain</p>
	<p>Kapus Mannanti Sinjai</p> <p>Waktu : 07 juni 2021</p>	<p>Apa saja yang Anda lakukan terkait dengan edukasi Covid-19?</p>	<p>Saya rasa kami sudah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan Covid-19 Pak, kami juga sudah berkoordinasi baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan untuk mengedukasi terhadap hal tersebut” (07 Juni 2021)</p>
	<p>Kapus Lappae Sinjai</p> <p>Waktu 07 Juni 2021</p>	<p>Bagaimana kejadian kasus Covid-19 di Lappae?</p>	<p>Satu hari setelah para petugas kesehatan tersebut di isolasi barulah terbit surat pemberitahuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten terkait dibolehkannya isolasi mandiri dengan 7 ketentuan (syarat).</p>
	<p>Plt.Kadis Dinkes Sinjai</p>	<p>Bagaimana tindakan Anda selaku Kads terkait tuntutan pencoptan Kapus Lappae dan Mannanti?</p>	<p>Terkait keputusan pencoptan tersebut kami tidak bisa langsung mengevaluasi hal tersebut karena kami juga harus melihat indikator-indikator lain”</p>
	<p>Ketua Komisi I DPRD Sinjai</p> <p>Waktu 15 Juni 2021</p>	<p>Bagaimana tanggapan Dewan terhadap kisruh pemtongan insentif nakes?</p>	<p>Saya kira apa yang menjadi aspirasi masyarakat perlu diklarifikasi oleh Kadis Kesehatan, apakah betul adanya pemotongan Insentif Nakes.</p>

	<p>Staf Sekretariat DPRD Sinjai</p> <p>Waktun : 03 Juni 2021</p>	<p>Apakah catatan Anda pernah ada pengaduan masyarakat masalah kesehatan di Sinjai di Komisi I</p>	<p>Betul pernah dilakukan terkait dengan masalah adanya ribuan data penerima BPJS yang dihapus. Karena masyarakat resah, mereka mengadu ke Komisi I.</p>
	<p>Anggota Komisi I DPRD Sinjai</p> <p>Waktu : 04 Juni 2021</p>	<p>Pengaduan apa yang pernah Anda terima?</p>	<p>ya pernah, kami menerima pengaduan dari masyarakat bahwa adanya 8.000 data PBI BPJS yang dihapus. Hal tersebut meresahkan masyarakat. Setelah itu kami lakukan konfirmasi kepada BPJS, ternyata itu hanya penghapusan data yang sudah tidak valid, karena sudah ada yang meninggal, ada yang pindah dan ada data yang tumpang tindih. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi kan rakyat resah, ya kami tanggapai serius</p>
	<p>Plt. Kadis Kesehatan Sinjai</p> <p>Waktu : 20 Juni 2021</p>	<p>Bagaiman pencapaian kinerja Dinkes 2020?</p>	<p>Ya, Kami tahun di 2020 lalu telah bekerja maksimal, program kerja yang kami ajukan mulai dari dinas sampai jajaran terendah kami semua berjibaku untuk merealisasikan program tersebut. Namun kami sadari masih ada 11,33 % tidak terlaksana, salah satu faktornya adalah adanya pandemi Covid-19 yang menarik perhatian dan tumpahan energi</p>
	<p>Kapus Sinjai</p> <p>Waktu :</p>	<p>Bagaimana menurut Anda Kinerja Dinas kesehatan dan Anda tahun 2020</p>	<p>Tahun 2020 lalu penuh perjuangan dan tantangan, salah satunya adalah adanya pandemi Covid-19. Ini menguras energi karena banyak masyarakat tidak paham tentang Covid-19 bahkan ada yang tidak percaya, sehingga perlu sosialisasi yang intens. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan program kerja sesuai waktunya, meskipun ada yang kurang (tidak 100%)</p>

	Monitoring dan Umpan Balik Berkelanjutan	Anggota Komisi I DPRD Waktu : 25 Juni 2021	Bagaimana bentuk monitoringnya Komisi I DPRD	Bentuk monitoring yang kami lakukan adalah memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan, apakah sesuai jadwal. Misalnya masalah penggunaan anggaran (program kerja) sudah memasuki bulan pertengahan, tetapi informasi belum mencapai 50 %, maka kami panggil pemerintah (dinas terkait), kami juga memantau situasi di lapangan melalui masyarakat sebagai konstituen kami, apakah program sudah terlaksana atau belum, jika belum maka kami lakukan pengecekan di lapangan
		Staf Sekretariat DPRD Sinjai Waktu : 25 Juni 2021	Berapa kali Komisi I Melakukan monitoring terhadap bidang kesehatan 2020?	Kalau monitoring langsung biasanya 1 kali setahun, maksimal 2 kali. Tahun 2020 lalu 1 kali pada bulan September, mengenai realisasi anggaran yang sempat tertunda di beberapa Puskesmas, khususnya masalah stunting yang Covid-19. Sedangkan monitoring tak langsung hanya 1 kali yaitu masalah pelayanan di BPJS yang masih lambat
		Anggota Komisi I DPRD Waktu : 25 Juni 2021	Berapa kali Anda melakukan monitoring pada bidang kesehatan ?	Kita lakukan hanya 1 kali karena kinerja Dinkes dan jajarannya termasuk baik, tentu kami apresiasi itu, masalah Covid-19 itu penting karena ini wabah virus yang harus kita antisipasi penyebarannya dan lindungi masyarakat
	Review Formal, Umpan Balik dan Penilaian Menyeluruh	Ketua Komisi I DPRD Sinjai Waktu : 25 Juni 2021	Apa yang ada review terhadap Kesehatan dasar Sinjai ?	Melihat laporan kinerja Dinkes Sinjai 2020 yang mampu merealisasikan APBD mencapai 88, 67%, menurut kami itu prestasi yang perlu kami apresiasi, apalagi ketidaktercapaian menjadi 100% karena adanya faktor urgen (pandemi)

	Anggota Komisi I DPRD Waktu : 25 Juni 2021	Apa dasar/indikator yang Anda gunakan melakukan review terhadap kinerja Dinkes Kabupaten Sinjai?	Kita mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, adalah Indikator kinerja utama (IKU), dimana di kebijakan itu sudah ada interval penilaiannya.
	Anggota Komisi I DPRD Waktu : 25 Juni 2021	Bagaimana tanggapan Anda terhadap pencapaian kinerja Dinkes 2020?	Ya, kita apresiasi pencapaian itu, akan tetapi tetap kita harus katakan bahwa masih ada pekerjaan yang tertunda belum tercapai. Sehingga bila kita merujuk dari standar IKU ada pencapaian tinggi dan ada juga yang masih rendah. Masih perlu kerja keras dan fokus
	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Waktu :	Tanggapan Anda mengenai Keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinkes 2020?	Ada 3 indikator yang gagal, yakni; indeks kepuasan masyarakat karena kuesioner yang kita bagikan tidak maksimal, karena adanya pandemi Covid-19, termasuk terkendala UCI yang tidak maksimal dari target 80 desa tapi hanya 64 desa, begitu juga prevalensi TB dan Screening HIV, karena pandemi Covid-19.
	Ketua Komisi I Waktu : 20 Juni 2021	Apa tanggapan DPRD Sinjai terkait pencapaian kinerja tahun 2020?	Apa yang disampaikan oleh pihak Dinkes Sinjai pada Lkj 2020 lalu dapat kami terima alasan kegagalan pencapaian kinerjanya, karena pandemi Covid-19 yang sangat menyita waktu, tenaga dan anggaran. Maka dari itu kami apresiasi, walau tetap bekerja keras, demi rakyat.
	Tokoh Masyarakat Sinjai pemerhati masalah kesehatan Waktu : 25 Juni 2021	Sebagai tokoh masyarakat, Bagaimana tanggapan Anda terkait pencapaian kinerja Dinkes tahun 2020 mencapai 88,67 % realisasi APBD	Menurut saya, kinerja Dinkes dan jajarannya semakin tahun semakin membaik, di beberapa pelayanan kesehatan umum sudah jarang ada komplain masyarakat, walau masih ada, artinya belum semuanya baik. Apalagi saya dengar dan baca realisasi APBD 88 %, itu bagus, apalagi sejak tahun lalu (2020) ada pandemi Covid-19, tapi tetap perlu kerja bagus dan berkinerja bagus
Penilaian Kinerja	Kadis Kesehatan Sinjai Waktu : 25 Juni 2021	Bagaimana prestasi Dinkes 2020?	Tahun 2020 Dinkes meraih 10 kategori sangat tinggi, 1 tinggi, 1 rendah dan 1 sangat rendah

		Anggota Komisi I DPRD Sinjai Waktu : 25 Juni 2021	Bagaimana tanggapan Anda terhadap prestasi Dinkes 2020?	Ya, tentu saja kami apresiasi itu, apalagi di musim pandemi saat ini Dinkes masih mampu berprestasi seperti itu. itu layak diberikan penghargaan, walau masih tersisah "PR" yang masih rendah dan sangat rendah

Lampiran II



